WALI KOTA BANJARMASIN

Yth. Seluruh Kepala SKPD
Selaku Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran
di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin
di
Banjarmasin

SURAT EDARAN
NOMOR 900/ 406 -TAPD/2025
TENTANG
RASIONALISASI BELANJA PADA PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

Sehubungan dengan terjadinya penurunan alokasi Transfer Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2026, maka perlu dilakukan langkah penyesuaian terhadap struktur belanja daerah dalam Rancangan APBD Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2026. Untuk itu, kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin diinstruksikan untuk melakukan rasionalisasi dan penyesuaian belanja pada RKA-SKPD Tahun Anggaran 2026, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Melakukan penyesuaian pagu belanja pada komponen belanja dengan pembatasan yang telah ditetapkan sebagaimana berikut:
   a. Belanja Pegawai pada Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN pada Objek belanja Gaji dan Tunjangan ASN (5.1.01.01.XXX.XXXXX) paling banyak sebesar pagu pada Objek belanja Gaji dan Tunjangan ASN (5.1.01.01.XXX.XXXXX) Tahun Anggaran 2025 ditambah accress sebesar 2,5% (dua koma lima persen);
   b. Belanja Perjalanan Dinas berupa Perjalanan Dinas Biasa (5.1.02.04.001.00001) dan Perjalanan Dinas Dalam Kota (5.1.02.04.001.00003) paling banyak sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari pagu anggaran Tahun 2025;
   c. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (5.1.02.04.001.00004) paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) dari pagu anggaran Tahun 2025;
   d. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (5.1.02.04.001.00005) ditiadakan/dinolkan;
   e. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (5.1.02.01.001.00024) paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) dari pagu anggaran Tahun 2025; dan
   f. Belanja Makanan dan Minuman Rapat (5.1.02.01.001.00052) hanya dianggarkan berupa Kudapan/Snack.

2. Melakukan rasionalisasi atau pengurangan sebesar 8% (delapan persen) dari pagu SKPD diluar belanja pegawai setelah dilakukan penyesuaian pada poin 1 diatas, yang diutamakan pada belanja-belanja berikut:
    a. Belanja Hibah;
    b. Belanja pembuatan dokumen kajian/tenaga ahli/jasa konsultansi non konstruksi;
    c. Penyelenggaraan Acara / *Event Organizer*;
    d. Belanja-belanja pendukung untuk kegiatan yang bersifat seremonial seperti pembagian kaos, seminar kit;
    e. Belanja Pelaksanaan studi banding;
    f. Belanja jasa tenaga penunjang kegiatan;
    g. Belanja honorarium;
    h. Belanja publikasi;
    i. Belanja sewa;
    j. Belanja TIK yang tidak terkait dengan *coresystem* seperti *license* aplikasi pendukung, pembaharuan hardware dll;
    k. Belanja Pemeliharaan yang belum mendesak/ dapat ditunda;
    l. Belanja Modal yang belum mendesak/ dapat ditunda/dibatalkan kecuali yang bersifat prioritas dan mendukung layanan publik; dan
    m. Belanja lainnya yang tidak menunjang secara langsung pada pencapaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan.
3. Jenis Belanja yang dilakukan pembatasan/rasionalisasi bukan berasal dari belanja wajib dan mengikat lainnya termasuk belanja yang sudah ditentukan sumber pendanaan dan peruntukkannya seperti DAK Fisik, DAK Non Fisik, DAU SG, DBH Sawit, Opsen, Pajak Rokok, PBJT Listrik, BLUD serta Belanja Prioritas KDH/WKDH.
4. Hasil rasionalisasi dan penyesuaian alokasi anggaran tetap berfokus kepada target kinerja pelayanan publik.
5. Dalam pelaksanaan rasionalisasi belanja/penyesuaian perangkat daerah memperhatikan ketentuan pada angka 1 sampai dengan 4 diatas.
6. Batas waktu penginputan hasil rasionalisasi/penyesuaian belanja pada Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD-RI) paling lambat tanggal 26 Oktober 2025.

Seluruh proses dalam rangka rasionalisasi/ penyesuaian belanja agar dapat dilakukan secara optimal tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik dan tetap memastikan bahwa tujuan kegiatan tercapai dengan tetap mengedepankan prinsip efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan anggaran serta dilaksanakan secara transparan, akuntabel dan bertanggung jawab, serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Banjarmasin
Pada tanggal : 20 Oktober 2025

WALI KOTA BANJARMASIN,

MUHAMMAD YAMIN HR

LAMPIRAN
SURAT EDARAN
NOMOR 900/ 406 -TAPD/2025
TENTANG
RASIONALISASI BELANJA PADA PENYUSUNAN
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

PERHITUNGAN PEMBATASAN DAN RASIONALISASI BELANJA PADA R-APBD T.A. 2026

SKPD	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	Belanja Perjalanan Dinas	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Total pengurangan pada belanja yang dilakukan pembatasan	Rasionalisasi Belanja Lainnya	Total Penyesuaian dan Rasionalisasi	Pagu Akhir SKPD
1	2	3	4	5	6	7	8=(2+3+4+5+6)	9	10 =(7+8)	11
Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan Dan Pelatihan	116.725.447	565.879.600	319.710.000		82.447.640	305.325.000	1.390.087.687	614.293.940	2.004.381.627	15.124.759.813
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	445.171.634	433.401.300	194.876.000		116.707.850	237.240.000	1.427.396.784	708.986.553	2.136.383.337	13.714.719.839
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	319.532.450		100.000		10.409.960	40.545.000	370.587.410	96.279.050	466.866.459	3.935.059.951
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	1.161.252.029	258.045.400	114.215.000	86.600.000	556.395.600	590.130.000	2.766.638.029	1.838.245.517	4.604.883.546	61.376.753.636
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	230.560.560				20.301.000	671.760.000	922.621.560	270.835.091	1.193.456.651	11.807.849.768
Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	348.579.249	634.706.000	349.165.500		224.743.590	245.250.000	1.802.444.339	3.080.206.875	4.882.651.214	45.585.512.615
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7.636.458	213.355.400			256.836.010	36.675.000	514.502.868	289.642.303	804.145.171	10.446.665.397

SKPD	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	Belanja Perjalanan Dinas	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Total pengurangan pada belanja yang dilakukan pembatasan	Rasionalisasi Belanja Lainnya	Total Penyesuaian dan Rasionalisasi	Pagu Akhir SKPD
1	2	3	4	5	6	7	8=(2+3+4+5+6)	9	10 =(7+8)	11
Dinas Kesehatan	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	-	**-**
Dinas Kesehatan	8.501.090.463	231.603.000	284.304.500		148.654.451	3.318.120.000	12.483.772.414	3.823.483.020	16.307.255.433	211.468.609.469
RSUD Sultan Suriansyah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71.200.000.000
Labkesda	-	-	-	-	59.872.040	-	-	-	-	2.057.956.622
Puskesmas (28 Puskesmas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.917.648.051
Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan		1.032.794.900	19.600.000		114.256.090	143.910.000	1.310.560.990	629.286.755	1.939.847.745	19.912.036.182
Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik	22.614.712	188.484.200			62.503.880	225.540.000	499.142.792	1.367.060.703	1.866.203.495	23.787.923.257
Dinas Koperasi Usaha Mikro Dan Tenaga Kerja		307.032.700	132.750.000		195.237.310	344.115.000	979.135.010	462.071.521	1.441.206.531	13.995.702.486
Dinas Lingkungan Hidup	672.900.266	1.410.441.000	143.280.000		67.236.690	232.560.000	2.526.417.956	8.339.218.937	10.865.636.892	107.943.499.871
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.568.828.914	397.435.200	287.707.000		200.435.774	731.754.000	4.186.160.888	23.124.777.065	27.310.937.953	282.138.028.352
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	168.261.364	82.287.800			34.619.853	95.400.000	380.569.017	538.887.216	919.456.232	11.116.793.554
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		59.122.600	168.168.000		97.601.059	269.280.000	594.171.659	163.301.224	757.472.883	8.541.404.910

SKPD	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	Belanja Perjalanan Dinas	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Total pengurangan pada belanja yang dilakukan pembatasan	Rasionalisasi Belanja Lainnya	Total Penyesuaian dan Rasionalisasi	Pagu Akhir SKPD
1	2	3	4	5	6	7	8=(2+3+4+5+6)	9	10 =(7+8)	11
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	452.058.506	116.766.000			26.499.200	22.050.000	617.373.706	124.015.300	741.389.006	10.875.599.717
Dinas Pendidikan	12.683.447.968		3.427.752.000			263.790.000	16.374.989.968	4.822.347.845	21.197.337.813	484.330.758.223
Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Masyarakat	218.891.022		114.980.000		622.256.320	1.049.445.000	2.005.572.342	716.618.949	2.722.191.291	15.213.247.030
Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	1.238.968.329	1.149.021.600	1.050.341.500		91.136.120	393.660.000	3.923.127.549	1.047.195.998	4.970.323.546	22.582.197.078
Dinas Perhubungan	1.680.632.032	179.967.900	219.084.000			199.170.000	2.278.853.932	6.231.833.936	8.510.687.868	86.142.120.798
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	194.815.843	410.357.000	273.705.000		208.661.750	41.400.000	1.128.939.593	298.718.701	1.427.658.293	10.133.333.041
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	417.910.018	316.277.900	36.856.000		197.914.700	188.460.000	1.157.418.618	1.873.008.622	3.030.427.240	29.201.028.086
Dinas Sosial	178.734.718	1.468.606.500	160.285.000		48.881.140	184.590.000	2.041.097.358	1.325.007.702	3.366.105.060	21.597.854.128
Inspektorat		1.144.379.100		75.775.000	36.240.630	166.275.000	1.422.669.730	561.313.333	1.983.983.063	19.841.175.327
Kecamatan Banjarmasin Barat	1.689.653.994	617.465.500			58.834.814	233.190.000	2.599.144.308	781.539.691	3.380.683.999	23.546.210.684
Kecamatan Banjarmasin Selatan		1.321.056.900			95.530.585	396.990.000	1.813.577.485	1.238.140.050	3.051.717.535	29.361.556.580
Kecamatan Banjarmasin Tengah		1.037.194.300	38.375.000			538.605.000	1.614.174.300	1.119.758.093	2.733.932.393	27.684.572.014

SKPD	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	Belanja Perjalanan Dinas	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Total pengurangan pada belanja yang dilakukan pembatasan	Rasionalisasi Belanja Lainnya	Total Penyesuaian dan Rasionalisasi	Pagu Akhir SKPD
1	2	3	4	5	6	7	8=(2+3+4+5+6)	9	10 =(7+8)	11
Kecamatan Banjarmasin Timur	1.363.419.387	209.813.900			25.974.725	354.195.000	1.953.403.011	941.279.888	2.894.682.899	25.344.351.055
Kecamatan Banjarmasin Utara	94.242.761	892.096.400			93.637.661	599.805.000	1.679.781.822	1.313.997.433	2.993.779.254	28.671.471.606
Satuan Polisi Pamong Praja	778.798.975				59.756.170	135.360.000	973.915.145	1.084.975.716	2.058.890.861	26.359.647.437
Sekretariat DPRD		11.448.648.100			88.811.400	3.105.000.000	14.642.459.500	3.678.373.480	18.320.832.980	84.274.646.608
Sekretariat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bagian Administrasi Pembangunan		127.253.400			5.594.800	53.820.000	186.668.200	30.300.944	216.969.144	348.460.856
Bagian Hukum		196.793.800	12.875.000		20.380.600	53.550.000	283.599.400	120.573.648	404.173.048	1.386.596.952
Bagian Kesejahteraan Rakyat						1.197.000.000	1.197.000.000	1.708.717.438	2.905.717.438	19.650.250.532
Bagian Organisasi		49.660.300	21.270.000		17.639.400	141.975.000	230.544.700	79.290.824	309.835.524	911.844.476
Bagian Pemerintahan			38.650.000		9.043.800	104.400.000	152.093.800	126.432.488	278.526.288	1.453.973.612
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa		81.468.500	-		11.313.250	76.500.000	169.281.750	88.196.624	257.478.374	1.014.261.176
Bagian Perekonomian		39.132.900	20.400.000	25.980.000	28.884.150	105.975.000	220.372.050	64.126.612	284.498.662	737.456.038

SKPD	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	Belanja Perjalanan Dinas	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Total pengurangan pada belanja yang dilakukan pembatasan	Rasionalisasi Belanja Lainnya	Total Penyesuaian dan Rasionalisasi	Pagu Akhir SKPD
1	2	3	4	5	6	7	8=(2+3+4+5+6)	9	10 =(7+8)	11
Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan		475.154.340			38.079.500		513.233.840	251.837.165	765.071.005	2.896.127.395
Bagian Umum	2.281.763.129	2.919.100			164.040.110	22.500.000	2.471.222.339	2.693.546.142	5.164.768.481	59.973.821.246

Ditetapkan di : Banjarmasin
Pada tanggal: 20 Oktober 2025

WALIKOTA BANJARMASIN,

MUHAMMAD YAMIN HR